



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENCANA KERJA 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2019.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Magelang	40
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Magelang.....	49
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	65
BAB III	66
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	66
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	66
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2020 BPKAD Kota Magelang.....	67
3.3. Program dan Kegiatan.....	70
BAB IV	72
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	72
BAB V	88
PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 1 Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Penunjang	
Tabel 2.2. 1 Tabel Laporan Kemajuan Kegiatan BPKAD Kota Magelang Per 31 Desember 2019	40
Tabel 2.4. 1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Pemerintah Kota Magelang	52
Tabel 4.1 1	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu disusun RKPD Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2020.

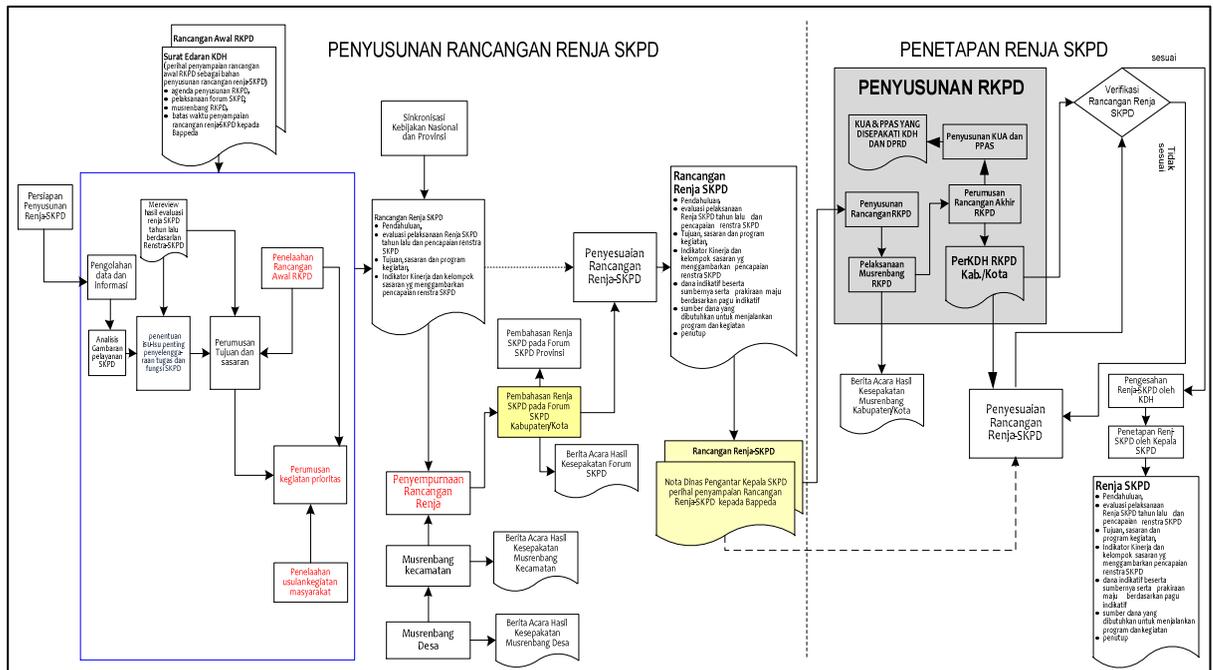
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan, RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahunan Pemerintah Kota Magelang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2020.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:
 - a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
 - b. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021;

- c. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;
- d. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Di dalam penyusunan RENJA 2020 BPKAD Kota Magelang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang di susun dengan mengacu pada Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”. Perumusan visi tersebut disesuaikan dengan bidang tugas dari BPKAD Kota Magelang. Adapun untuk Misi dari BPKAD Kota Magelang untuk tahun 2016-2021 adalah mendukung pada Misi yang pertama, yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2020 merupakan rencana pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020, dimana dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020, dimana disebutkan pada Bab I Pendahuluan bahwa Rancangan RKPD Kota Magelang tahun 2020 ini merupakan tahun perencanaan keempat tahap III pelaksanaan RPJMD 2016-2021 yang disusun pada tahun 2019 dan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja OPD seperti yang kami Gambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Penyusunan Rancangan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 050/ 104 /112 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2020 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Tujuan dibuatnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di BPKAD
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di BPKAD Kota Magelang.

Dengan demikian dokumen Renja BPKAD Tahun 2020 ini sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran BPKAD dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Kepala BPKAD Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penullisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota

Magelang Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPKAD
Kota Magelang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Magelang

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BPKAD Kota Magelang

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA MAGELANG

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Magelang

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2018 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda tersebut dinyatakan bahwa BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BPKAD pada dasarnya mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penambahan fungsi pengelolaan barang milik daerah. Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Secara umum tugas BPKAD adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar tugas tersebut maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah; pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah; pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung; pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah; serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

2.1.1. Evaluasi Capaian RENJA BPKAD Kota Magelang Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018, BPKAD mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :

- A. Pendapatan sebesar Rp. 47.839.883.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.489.105.692,- dengan capaian 118,08%. Pendapatan ini terdiri dari 4 komponen pendapatan, yaitu : hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari keempat komponen tersebut rata-rata memiliki capaian melebihi target anggaran. Dan komponen penyumbang pendapatan terbesar adalah dari komponen hasil pajak daerah. Dimana dengan target pendapatan sebesar Rp. 30.646.800.000,- berhasil terealisasi sebesar RP. 34.283.039.991,- atau 111,86%. Untuk pajak daerah itu sendiri terdiri dari 10 jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallow, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- B. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.835.074.000,-, dan terealisasi sebesar Rp. 5.967.807.240,- atau sebesar 87,31%.
- C. Belanja Langsung sebesar Rp. 20.068.042.000,- yang terdiri dari 7 Program 127 kegiatan. Sesuai data realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di BPKAD Kota Magelang sudah *on the track* dan relatif baik. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi sebesar Rp. 18.210.915.975,- , atau 90,74% dengan perincian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.096.116.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.810.313.352,-, dengan capaian 86.37%.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.358.868.000,-, terealisasi sebesar Rp. 2.133.656.243,- dengan capaian 90.45%.
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 217.191.000,- terealisasi sebesar Rp 214.851.948,- , dengan capaian 98.92%.
 4. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 6.450.614.000 , terealisasi sebesar Rp. 5.897.071.736,- dengan capaian 91.42%.
 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan pagu anggaran Rp. 124.850.000,-, terealisasi sebesar Rp. 117.722.900,- dengan capaian sebesar 94.29%.

6. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.099.144.000,-, terealisasi sebesar Rp. 2.958.592.885,- dengan capaian 94.46%.
 7. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.721.259.000,-, terealisasi sebesar Rp. 5.078.706.911,- dengan capaian sebesar 88.77%.
- D. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sebanyak 127 kegiatan tersebut terdapat 9 kegiatan 7,08% yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu serapan anggarannya kurang dari 75%, antara lain:
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan serapan anggaran sebesar 65,03%
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan serapan anggaran sebesar 73,59%
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor dengan serapan anggaran yang terealisasi sebesar 59,84%
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dengan serapan anggaran sebesar 68,26%
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan serapan anggaran yang terealisasi sebesar 72,87%
 - f. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serapan anggaran yang terealisasi adalah sebesar 71,37%
 - g. Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar 71,83
 - h. Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda, dengan realisasi anggaran sebesar 59,82%
 - i. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, dengan realisasi anggaran sebesar 72,11%

Pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung yang memiliki serapan anggaran lebih dari 75% sebanyak 118 kegiatan atau sebesar 92,91% dari keseluruhan kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan pada BPKAD Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2019 bisa dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.1.

Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Kota Magelang Tahun 2018

No.	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	%
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	124.850.000	100	117.722.900	94,29
1	Pendataan dan penataan	124.850.000	100	117.722.900	94,29

	dokumen / arsip daerah				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.096.116.000	100	1.810.313.352	86,37
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	100	997.000	99,70
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	285.662.000	100	185.772.038	65,03
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.900.000	100	13.908.300	73,59
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	906.986.000	100	765.495.500	84,40
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.565.000	100	68.558.065	99,99
6.	Penyediaan alat tulis kantor	34.500.000	100	34.485.300	99,96
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.751.000	100	32.548.750	99,38
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.000.000	100	23.954.900	99,81
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	100	19.485.000	97,43
10.	Penyediaan bahan logistik kantor	13.080.000	100	7.827.700	59,84
11.	Penyediaan makanan dan minuman	130.000.000	100	129.041.160	99,26
12.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260.320.000	100	247.884.083	95,22
13.	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	169.475.000	100	169.474.272	100,00
14.	Pengelolaan administrasi kepegawaian	130.877.000	100	110.881.284	84,72
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.358.868.000	100	2.133.656.243	90,45
1.	Pengadaan perlengkapan	476.835.000	100	470.105.000	98,59

	gedung kantor				
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	419.112.000	100	369.749.000	88,22
3.	Pengadaan mebeleur	85.250.000	100	81.983.700	96,17
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	98.135.000	100	93.363.300	95,14
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	372.340.000	100	285.909.543	76,79
6.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	39.960.000	100	27.275.000	68,26
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	210.175.000	100	175.543.700	83,52
8.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.200.000	100	6.850.000	95,14
9.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	649.861.000	100	622.877.000	95,85
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	217.191.000	100	214.851.948	98,92
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	44.000.000	100	43.994.800	99,99
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	14.100.000	100	14.034.500	99,54
3.	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.000.000	100	6.990.200	99,86
4.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	48.510.000	100	48.131.500	99,22
5.	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	92.930.000	100	91.158.948	98,09
6.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	10.651.000	100	10.542.000	98,98
	Program peningkatan dan Pengembangan	6.450.614.000	100	5.897.071.736	91,42

	pengelolaan keuangan daerah				
1.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	38.520.000	100	35.997.600	93,45
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	463.228.000	100	408.241.327	88,13
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	240.892.000	100	195.111.500	81,00
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	367.550.000	100	327.317.500	89,05
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	343.453.000	100	293.254.000	85,38
6.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	200.078.000	100	188.505.500	94,22
7.	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	467.753.000	100	446.103.300	95,37
8.	Pembuatan Daftar Gaji	129.594.000	100	128.897.000	99,46
9.	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	54.180.000	100	50.790.000	93,74
10.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	192.213.000	100	184.092.550	95,78
11.	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	31.805.000	100	31.602.400	99,36
12.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	190.884.000	100	178.959.800	93,75
13.	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	111.590.000	100	108.832.100	97,53
14.	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan	250.215.000	100	221.943.669	88,70

	keuangan daerah				
15.	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	40.744.000	100	40.680.700	99,84
16.	Penyusunan laporan posisi kas daerah	33.900.000	100	33.832.100	99,80
17.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	212.945.000	100	190.945.050	89,67
18.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	94.308.000	100	89.739.400	95,16
19.	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	185.093.000	100	155.077.000	83,78
20.	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	95.268.000	100	81.609.500	85,66
21.	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	41.576.000	100	33.927.000	81,60
22.	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	49.280.000	100	40.457.000	82,10
23.	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	151.116.000	100	149.970.500	99,24
24.	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	146.321.000	100	142.982.150	97,72
25.	Pengesahan dan penerbitan SPD	76.600.000	100	72.578.700	94,75
26.	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	254.044.000	100	240.786.660	94,78
27.	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	123.696.000	100	115.134.130	93,08
28.	Pengendalian dan penerbitan SPM	35.245.000	100	35.203.000	99,88
29.	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	69.410.000	100	65.942.300	95,00

30.	Penyusunan laporan pajak	88.660.000	100	75.939.000	85,65
31.	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	36.688.000	100	34.967.216	95,31
32.	Penyusunan anggaran kas	29.558.000	100	27.583.596	93,32
33.	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	43.570.000	100	40.155.000	92,16
34.	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	48.676.000	100	40.951.000	84,13
35.	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	40.391.000	100	34.820.925	86,21
36.	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	159.202.000	100	156.511.328	98,31
37.	Penyusunan data keuangan daerah	99.608.000	100	87.750.966	88,10
38.	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	118.459.000	100	108.381.694	91,49
39.	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	61.118.000	100	60.895.400	99,64
40.	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	230.009.000	100	226.436.000	98,45
41.	Workshop pengelolaan keuangan daerah	77.993.000	100	73.380.000	94,09
42.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	304.595.000	100	239.896.375	78,76
43.	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	56.925.000	100	56.513.000	99,28
44.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi	55.880.000	100	50.737.500	90,80

	anggaran Tingkat Kota				
45.	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	115.451.000	100	114.808.800	99,44
46.	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	80.728.000	100	72.328.000	89,59
47.	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	111.602.000	100	106.502.500	95,43
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.099.144.000	100	2.958.592.885	95,46
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	500.158.000	100	484.130.720	96,80
2.	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	40.263.000	100	38.262.350	95,03
3.	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	51.731.000	100	51.301.500	99,17
4.	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	126.500.000	100	125.028.700	98,84
5.	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	160.783.000	100	146.685.000	91,23
6.	Intensifikasi Pemungutan PBB	376.705.000	100	357.844.800	94,99
7.	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	200.160.000	100	197.896.500	98,87
8.	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	122.929.000	100	121.970.900	99,22
9.	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	400.189.000	100	370.741.282	92,64

10.	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	81.099.000	100	80.912.950	99,77
11.	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	145.613.000	100	132.829.000	91,22
12.	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	113.247.000	100	112.277.794	99,14
13.	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	73.920.000	100	73.512.400	99,45
14.	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	133.806.000	100	132.225.300	98,82
15.	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	286.946.000	100	257.065.850	89,59
16.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	65.992.000	100	60.829.500	92,18
17.	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	103.680.000	100	102.197.000	98,57
18.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	79.538.000	100	77.794.039	97,81
19.	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	35.885.000	100	35.087.300	97,78
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.721.259.000	100	5.078.706.911	88,77
1.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	33.305.000	100	30.778.000	92,41
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	110.366.000	100	101.420.200	91,89
3.	Pemusnahan Barang Milik Daerah	261.408.000	100	237.461.250	90,84
4.	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang	24.090.000	100	22.888.750	95,01

	Milik Daerah				
5.	Pengadaan Mebeleur	15.890.000	100	14.856.600	93,50
6.	Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	530.616.000	100	505.837.700	95,33
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	300.646.000	100	280.838.021	93,41
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	427.214.000	100	311.322.607	72,87
9.	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	142.444.000	100	124.465.000	87,38
10.	Penghapusan Asset	77.588.000	100	63.405.000	81,72
11.	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	493.837.000	100	461.773.459	93,51
12.	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	145.400.000	100	134.239.200	92,32
13.	Penjualan asset daerah	94.948.000	100	83.753.000	88,21
14.	Penyelamatan asset daerah	214.490.000	100	202.665.735	94,49
15.	Penaksiran barang milik daerah	98.543.000	100	92.802.931	94,18
16.	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	137.144.000	100	116.977.468	85,30
17.	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	123.735.000	100	88.305.500	71,37
18.	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	124.086.000	100	119.517.600	96,32
19.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	54.452.000	100	49.622.200	91,13
20.	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	39.700.000	100	34.121.500	85,95
21.	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	320.627.000	100	230.314.255	71,83
22.	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	175.854.000	100	166.458.500	94,66
23.	Pengukuran pengembalian batas	13.770.000	100	8.237.600	59,82

	tanah milik Pemda				
24.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	30.463.000	100	21.966.870	72,11
25.	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30.400.000	100	25.738.633	84,67
26.	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	62.918.000	100	52.646.859	83,68
27.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	634.331.000	100	552.665.440	87,13
28.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	452.463.000	100	414.392.333	91,59
29.	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	58.453.000	100	52.309.000	89,49
30.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Barang Pengelola	84.287.000	100	77.250.000	91,65
31.	Pembangunan Gedung Kantor Barang Pengelola	407.791.000	100	399.675.700	98,01
	TOTAL	20.068.042.000	100	18.210.915.975	90,75

2.1.2. Evaluasi Capaian RENSTRA Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2021

A. Evaluasi Capaian Pendapatan

Penerimaan pendapatan daerah BPKAD Kota Magelang pada Tahun 2019 berhasil memenuhi bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini tentunya selain dikarenakan upaya kerja keras dari seluruh aparat di jajaran BPKAD Kota Magelang khususnya para petugas pemungut pajak, tentunya juga dikarenakan adanya program dan kegiatan yang mendukung.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi penerimaan pendapatan OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 dan 2019.

Tabel 2.1.2
Capaian Penerimaan Pendapatan BPKAD Kota Magelang
Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2018		Capaian (%)	Tahun 2019		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Pajak Daerah	30.646.800.000	34.283.039.991	111,86 %	35.000.000.000	40.432.696.639	115,52 %
2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.693.811.000	8.693.813.515	100%	9.982.607.000	9.098.845.504	91,15 %
3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.499.272.000	13.512.252.186	158,98 %	192.131.154.000	217.060.420.293	112,98 %
	Jumlah	47.839.883.000	56.489.105.692	118,08 %	237.113.761.000	266.591.962.436	112,43 %

Sumber : LRA BPKAD Kota Magelang, data diolah.

Pendapatan daerah BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp 266.591.962.436,- atau sebesar 112,43%, dari target pendapatan daerah dalam APBD Kota Magelang Tahun 2019 yang sebesar Rp. 237.113.761.000,-. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 40.432.696.639,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.098.845.504,- dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 217.060.420.293,-

Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa realisasi pendapatan BPKAD Kota Magelang pada tahun 2019 yaitu sebesar, Rp 266.591.962.436,-, dan itu berarti realisasi pada tahun 2019 ini terdapat kenaikan sebesar Rp 210.102.856.744,- atau 471,93% dari realisasi tahun 2019. Dengan demikian kinerja BPKAD Kota Magelang dalam hal pencapaian pendapatan daerah tergolong sangat baik.

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program BPKAD pada RPJMD Tahun 2016-2021

Indikator kinerja sasaran dalam Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dicapai melalui beberapa program. Adapun untuk melihat keberhasilan dari capaian kinerja program dapat dilihat dari capaian indikator programnya. Indikator kinerja program yang mendukung sasaran strategis sebagaimana tersaji di dalam Renstra Perubahan BPKAD, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. 1

Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Kinerja
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	70,00%	76,18%	108,83%
		Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%
		Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Pertumbuhan PAD	12,83%	9,07%	73,79%
		Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	84%	100%	119,05%

3.	Program peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	12,33%	14,83%	115,52%
		Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	3,33%	2,54%	100%

Adapun untuk desk capaian indicator kinerja pada triwulan IV tahun 2019 BPKAD Kota Magelang dapat dilihat pada table berikut :

DESK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
 TRIWULAN IV TAHUN 2018
 BPKAD KOTA MAGELANG

NO. URUT		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	LEBIH/KURANG
4	PENDAPATAN	902,675,937,000.00	906,170,431,098.00	100.39%	3,494,949,098.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	225,916,332,000.00	247,964,020,565.00	109.76%	22,047,688,565.00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30,646,800,000.00	34,283,039,991.00	111.86%	3,636,239,991.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4,909,300,000.00	5,630,460,829.00	114.69%	721,160,829.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	8,693,811,000.00	8,693,813,515.00	100.00%	2,515.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181,666,421,000.00	199,356,706,230.00	109.74%	24,929,266,293.00
4.2	DANA PERIMBANGAN	583,609,549,000.00	570,453,813,497.00	97.75%	(13,155,735,503.00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,321,942,000.00	24,421,266,688.00	80.54%	(5,900,675,312.00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	440,041,244,000.00	440,041,244,000.00	100.00%	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	113,246,364,000.00	105,991,302,809.00	93.59%	(7,255,060,191.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	93,150,056,000.00	87,752,597,036.00	94.21%	(5,397,458,964.00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	18,268,200,000.00	18,084,049,452.00	98.99%	(184,150,548.00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemda	52,555,256,000.00	46,788,343,659.00	89.03%	(5,766,912,341.00)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18,250,000,000.00	18,250,000,000.00	100.00%	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda	4,076,600,000.00	3,916,290,000.00	96.07%	(160,310,000.00)
4.3.6	Pendapatan Lainnya	-	713,913,925.00	0.00%	713,913,925.00

Dari 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran RKPD tersebut, ke semuanya mencapai target yang ditargetkan bahkan capaian kinerjanya ada yang melebihi 100%, yaitu indikator Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan terhadap Dana Pusat. Sedangkan dari 8 indikator kinerja program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang pada akhir tahun 2019 terdapat 6 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang capaian masih dibawah 80% ada 1 indikator yaitu Prosentase Pertumbuhan PAD.

1. Indikator Prosentase Pertumbuhan PAD

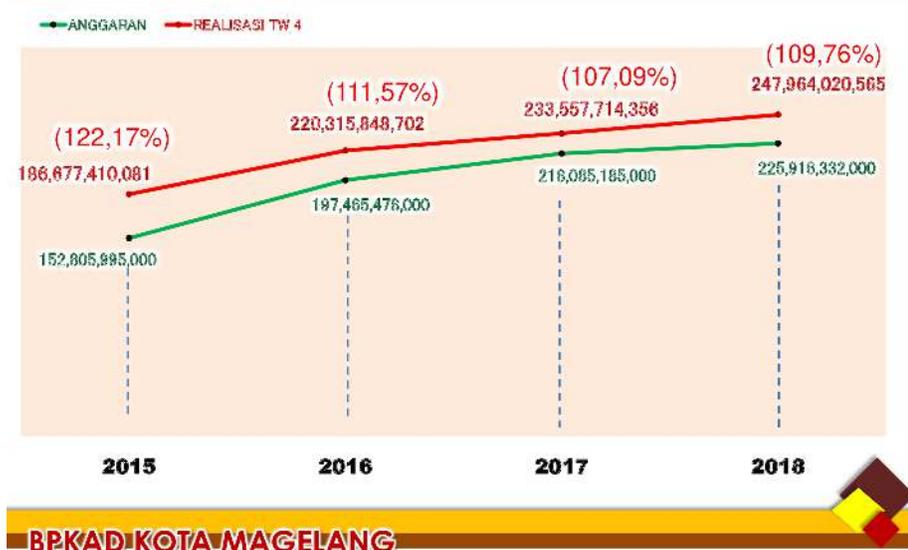
Definisi operasional dari indikator ini adalah Perbandingan antara kenaikan PAD tahun (x) dengan PAD tahun (x)-1 dikali 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2018 sebesar 6,99% Adapun target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun yang sama adalah 19,18%. Meskipun secara capaian turun atau tidak memenuhi target, namun untuk PAD sendiri trend-nya selalu meningkat selama 3 tahun berturut-turut. Trend peningkatan PAD Kota Magelang bisa dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Data Target dan Realisasi PAD Kota Magelang Tahun 2016 - 2018

PAD	Tahun		
	2016	2017	2018
Target	197.465.478.000	218.085.185.000	225.916.332.000
Realisasi	220.315.848.702	233.557.714.356	249.877.424.347

Sumber : Data Bidang Pendapatan BPKAD Kota Magelang, data diolah.

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TRIWULAN IV TAHUN 2015 S.D TAHUN 2018



Gambar 2.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 – 2018

Alasan indikator Prosentase Pertumbuhan PAD tidak tercapai adalah sebagai berikut :

- a. PAD saat ini sudah mendekati potensi yang ada sehingga akan menurunkan laju pertumbuhan PAD;
- b. Capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terutama yang berasal dari BLUD RSUD tidak naik secara signifikan yang disebabkan oleh penurunan jumlah pasien sebagai dampak dari pembangunan gedung RSUD yang belum selesai dan juga adanya peraturan baru dari BPJS yang mensyaratkan bagi pasien BPJS yang akan berobat tidak bisa langsung ke RSUD Tidar yang bertipe B tetapi harus mendapat rujukan dari RS tipe C dan D terlebih dahulu.
- c. Pencairan dana klaim asuransi BPJS dari RSUD yang tidak bisa tepat waktu.

2. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD

Indikator Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD merupakan indikator guna mengukur seberapa besar tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap penyumbang PAD yang sangat berperan penting dalam pembangunan di setiap pemerintah daerah. Cara mengukurnya adalah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi PAD. Pada capaian 2018 indikator ini terealisasi sebesar 2,26%, kurang bisa memenuhi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yang sebesar 3,63%, dengan capaian sebesar 112,44% dengan kriteria cukup. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang terus berubah dan berkembang sesuai

dengan kondisi perubahan lingkungan serta perubahan regulasi yang menyebabkan penurunan angka capaian indikator tersebut.

Alasan mengapa alasan indikator Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD tidak tercapai sebagai berikut :

- j. Adanya penyesuaian dengan regulasi tingkat pusat yaitu dengan terbitnya Permendagri No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Ijin Gangguan maka Perda No.19 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu musti dirubah dan disesuaikan yang otomatis menghapus penerimaan Retribusi Ijin Gangguan.
- k. Ada beberapa pos penerimaan yang tadinya masuk ke pos rekening penerimaan Retribusi Daerah berpindah ke pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada sub rincian penerimaan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa. Misalnya Sewa Gedung PDAM, Sewa Gedung Vita Grafika, Sewa Gedung Garba Parama Artha, Sewa Kios MT, Sewa Bus Pemkot, Sewa Mess Pemkot, dll.

C. Evaluasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Magelang pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Seperti telah disebutkan pada Bab I bahwa guna mendukung pencapaian Misi 1 pada RPJMD Kota Magelang, BPKAD Kota Magelang memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi	
		2018	2019	2018	2019
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif.	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP

Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Derajat Otonomi Fiskal	29,82%	31,96%	37,96%	39,62%
	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat	69,67%	67,45%	62,82%	59,78%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Nilai Opini BPK atas LKPD

Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern/ Predikat hasil LHE oleh BPK terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan setiap tahun secara rutin oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang, pada Tahun 2019 ini Pemerintah Kota Magelang berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya.

Namun demikian dalam memperoleh predikat WTP ini tak lepas dari beberapa kendala, diantaranya tercermin dalam table berikut :

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019				
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG				
NO	NAMA URUSAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	A. Terkait indikator Nilai Opini BPK atas LKPD (Bidang Akuntansi)		<u>Terobosan :</u>
		1) Masih ada beberapa temuan BPK terkait penatausahaan aset yang belum selesai tindak lanjutnya.	1) Mengoptimalkan tindak lanjut temuan pemeriksa BPK terkait pengelolaan aset.	
			2) Pembinaan dan asistensi yang intensif kepada Perangkat Daerah tentang pengelolaan aset yang menjadi kewenangannya.	
		2) Kurangnya pemahaman sekolah-sekolah tentang penatausahaan keuangan	1) Melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah terkait pengelolaan keuangan sekolah	1) Memanfaatkan ruang pojok pintar dengan mengundang pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan baik dari Perangkat Daerah maupun dari sekolah

		3) Belum adanya sosialisasi tentang peraturan baru terkait Permendagri Nomor 108 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Mengadakan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait peraturan-peraturan yang baru	1) Mengundang nara sumber dari instansi vertikal untuk memberikan sosialisasi terkait Permendagri Nomor 108 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
		A. Terkait indikator Nilai Opini BPK atas LKPD (Bidang Pembelanjaan : pelaporan data ke pusat untuk persyaratan transfer Dana Alokasi Umum)		Terobosan :
		Dari Tahun 2001 s/d 2019, DAU ditransfer ke daerah tanpa syarat apapun, namun mulai tahun 2020 penyaluran DAU bersyarat dan ada sanksinya Sesuai dengan PMK No.139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otsus tetapi aplikasi gaji yang dikembangkan oleh PT taspen belum mengakomodir semua nya.	Bendahara Gaji OPD harus mengirimkan data Realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan Realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan Tepat waktu	Pembuatan Aplikasi Untuk pembuatan dan Pecetakan data Realisasi Tunjangan Tambahan Penghasilan agar data mudah di himpun dan dilaporkan ke pusat
		B. Terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah		
		1) Terbatasnya jumlah personil dan kemampuan personil dalam kegiatan pendataan potensi pajakk daerah	Penambahan jumlah personil dan optimalisasi personil yang ada serta peningkatan kapasitas personil dengan pelatihan/diklat	

		2) Pengintegrasian data PBB dan BPHTB dengan BPN belum dapat dilakukan karena terkendala aturan BPN dari Pusat	Koordinasi dengan BPN Kanwil Pusat agar dapat dilakukan integrasi data	
		3) Sebagian Wajib Pajak air tanah belum memasang meter air sehingga ketentuan pajak air tanah masih sama setiap bulannya	Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada WP air tanah agar memasang meter air, dan berkoordinasi dengan DPMPTST Provinsi/ESDM Provinsi terkait perijinan pemasangan meter air	
		4) Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah)	pemasangan alat monitoring transaksi pembayaran pada hotel, restoran, hiburan dan parkir secara bertahap dimulai pada tahun 2018	kegiatan Implementasi Tapping Box. Sudah terpasang 10 alat pada tahun 2018 dan 2019, kemudian di akhir tahun 2019 disiapkan 50 alat
		5) pembayaran PBB oleh petugas pemungut PBB masih tunai sehingga petugas pemungut masih menyetorkan ke bank dan menyerahkan kembali bukti bayarnya setelah setor ke bank	dalam pemungutan PBB menggunakan internet banking yg terkoneksi dengan printer portabel sehingga bukti pembayaran dapat langsung dicetak pada saat menerima pembayaran dari WP dan uang yang diterima langsung masuk ke RKUD Kota Magelang di Bank Jateng	penggunaan internet banking dan printer portabel untuk pemungutan PBB yang dilakukan oleh petugas pemungut
		6) belum adanya tim untuk menindak secara tegas WP yang tidak membayar, baik itu melalui pemasangan stiker belum bayar pajak maupun pencabutan ijin usaha.	membuat tim dan revisi SOP Pemasangan Stiker Belum Bayar Pajak	tim dalam kegiatan Implementasi Tapping Box
		7) belum adanya koordinasi antara Kepolisian (ijin keramaian) dengan Pemerintah Kota (DPMPTSP dan BPKAD) untuk kegiatan yang tidak berijin	Koordinasi dan pemantauan lapangan atas semua kegiatan yang dilakukan di Kota Magelang	

- Derajat Otonomi Fiskal

Definisi operasional dari derajat otonomi fiskal adalah Kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

Pada tahun 2018 ini indikator berhasil diraih dengan capaian 37,96% dari target sebesar 29,82%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah semakin baik.

- Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat

Ukuran indikator kinerja Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Pada tahun 2018 ini berhasil dicapai 62,82% dari target sebesar 69,67%. Hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Magelang terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi semakin menurun. Berarti pula indikator tercapai sesuai yang diharapkan.

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran tersebut pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2018 sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Capaian seluruh sasaran bernilai sangat baik, artinya seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2018 telah sejalan dengan perencanaan kerja dan guna mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2018 banyak hal terkait inovasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Selain inovasi-inovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi, juga dilaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan baru. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang dan pencapaian Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang bisa dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 KOTA MAGELANG**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Teradministrasinya surat-surat dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet untuk memperlancar pelaksanaan tugas	12	Bulan	12	bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04.4.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan	64	Unit	61	Unit	77	STNK	77	STNK	100%	64	unit	40	STNK	50%
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan di lingkungan BPKAD	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya kelancaran tugas dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnya kelancaran tugas-tugas dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan	12	Bulan	12	bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%

4.04.4.04.01. 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menambah wawasan pengetahuan aparatur	2	Jenis	2	Jenis	2	jenis	2	Jenis	100%	2	jenis	1	jenis	50%
4.04.4.04.01.01 .16	Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya logistik kantor	24	Tabung	24	Tabung	24	tabung	24	Tabung	100%	24	tabung	12	tabung	50%
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tercapainya koordinasi antar daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04.4.04.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak , petugas keamanan dan petugas lapangan	23	orang	7	Orang	23	Orang	23	Orang	100%	23	Orang	23	Orang	100%
4.04.4.04.01. 01.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	kelancaran urusan kepegawaian	82	File	82	file	82	file	82	File	100%	82	dokumen	70	dokumen	50%

4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
4.04.4.04.01. 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor			6	Jenis	3	jenis	3	Jenis	100 %	12	jenis	9	jenis	100%
4.04.4.04.01. 02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung terpelihara	1	unit	1	Unit	1	unit	1	Unit	100 %	1	unit	2	unit	50%
4.04.4.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	64	unit	61	Unit	70	unit	70	Unit	100 %	64	unit	131	unit	40%
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	33	unit	34	Unit	41	unit	41	Unit	100 %	33	unit	75	unit	40%
4.04.4.04.01.0 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	7	jenis	8	Jenis	7	jenis	7	Jenis	100 %	7	jenis	15	jenis	60%
4.04. 4.04.01.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya sarana kerja kantor	20	buah	20	Buah	29	buah	29	Buah	100 %	20	buah	49	buah	40%
4.04.4.04.01.02 .36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya tempat parkir mobil, kanopi dan gudang di lingkungan BPKAD			3	Unit	237,00	m2	237,00	m2	100 %	240	M2	240	M2	100%
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															

4.04.4.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tercapainya target kinerja skpd	12	dokumen	12	Bulan	12	dokumen	12	Dokumen	100%	12	dokumen	24	dokumen	50%
4.04.4.04.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	3	laporan	3	Jenis	2	jenis	2	jenis	100%	5	jenis	5	jenis	100%
4.04.4.04.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	terwujudnya pedoman rencana kerja skpd	2	dokumen	2	Jenis	2	dokumen	2	Dokumen	100%	2	dokumen	4	Dokumen	50%
4.04.4.04.01.06.08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	terwujudnya pelaksanaan anggaran	2	dokumen			2	dokumen	2	Dokumen	100%	1		2		50%
4.04.4.04.01.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	terwujudnya renstra OPD 5 tahunan	1	dokumen			1	dokumen	1	Dokumen	100%					
4.04.4.04.01.06.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	spj yang diverifikasi dan disahkan	12	Bulan	12	Bulan	1.800	berkas	1.800	Berkas	100%	1000		1.812		50%
4.04.4.04.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	1	dokumen	1	jenis	1	dokumen	1	Dokumen	100%	2		2		100%
4.04.4.04.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah															
4.04.4.04.01.15.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Sebagai pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Perwal	75	buku	75	buku	75	buku	100%			151		0%
4.04.4.04.01.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Penetapan Perda tentang APBD TA. 2018	4	Dokumen			4	dokumen	4	Dokumen	100%	4	dokumen	8	dokumen	50%
4.04.4.04.01.15.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD TA. 2018	3	dokumen			3	dokumen	3	Dokumen	100%	3	dokumen	6	dokumen	50%
4.04.4.04.01.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2017	4	dokumen			4	dokumen	4	Dokumen	100%	4	dokumen	8	dokumen	50%
4.04.4.04.01.15.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD 2017	4	dokumen			4	dokumen	4	Dokumen	100%	4	dokumen	8	dokumen	50%
4.04.4.04.01.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	520	buku	468	buku	1	perda	1	Perda	100%	520	buku	989	buku	50%

4.04. 4.04.01.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	120	buku	120	buku	1	perwal	1	perwal	100 %	120	buku	120	buku	100%
4.04. 4.04.01.15.12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Menambah kelancaran pelaksanaan tugas	3	laporan			2	aplikasi	2	Aplikasi	100 %	12				
4.04. 4.04.01.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel			3	jenis	3	laporan	3	Laporan	100 %	20	laporan			
4.04. 4.04.01.15.16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	Tertatanya dokumen pencairan dana belanja langsung elektronik														
4.04. 4.04.01.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Termonitornya dan terpenuhinya laporan posisi kas daerah kepada Kementerian Keuangan RI setiap bulan														
4.04. 4.04.01.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUA 2018	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	Dokumen	100 %	2	dokumen	1	dokumen	40%
4.04. 4.04.01.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Nota Kesepakatan PPAS 2018	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	Dokumen	100 %	2	dokumen	1	dokumen	40%
4.04. 4.04.01.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUPA 2017	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	Dokumen	100 %	2	dokumen	1	dokumen	40%
4.04. 4.04.01.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKPA 2017	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	Dokumen	100 %	2	dokumen	1	dokumen	40%
4.04. 4.04.01.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD 2018	48	SKPD	135	buku	29	opd	29	Opd	100 %	48	SKPD			
4.04. 4.04.01.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang disahkan	48	SKPD	48	skpd	29	opd	29	Opd	100 %	48	SKPD			
4.04. 4.04.01.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Tertib Administrasi	370	berkas	360	berkas	500	bekas	500	Bekas	100 %	370	berkas	100	berkas	40%
4.04. 4.04.01.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengeluaran belanja	100	%	3000	SP2D	3.000	SP2D	3.000	SP2D	100 %	100	%			50%
4.04. 4.04.01.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Sebagai dasar penerbitan	100	%	170	SP2D	170	SP2D	170	SP2D	100	100	%			50%

		SP2D									%					
4.04. 4.04.01.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	612	buku	612	buku	12	dokumen	12	Dokumen	100 %	612	buku			50%
4.04. 4.04.01.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	552	laporan	552	laporan	348	laporan OPD	348	laporan OPD	100 %	552	laporan	200	laporan	40%
4.04. 4.04.01.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	100	%	1500	SPM	1.800	spm	1.800	Spm	100 %	100	%			60%
4.04. 4.04.01.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	48	SKPD	48	SKPD	48	SKPD	48	SKPD	100 %	29	SKPD	29	SKPD	70%
4.04. 4.04.01.15.48	Penyusunan laporan pajak	tersedianya laporan pajak setiap bulan	84	buku	84	buku	12	laporan	12	Laporan	100 %	12	laporan	6	laporan	50%
4.04. 4.04.01.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan anggaran lebih transparan dan akuntabel	2	laporan	2	laporan	2	laporan	2	Laporan	100 %	2	laporan	1	laporan	50%
4.04. 4.04.01.15.51	Penyusunan anggaran kas	Sebagai rencana penarikan dana pada setiap triwulan	100	%	75	buku	170	dokumen	170	Dokumen	100 %	100	%			50%
4.04. 4.04.01.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA sesuai dengan Perda dan Perwal penjabaran perubahan APBD 2017	48	SKPD	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100 %	29	OPD			

4.04. 4.04.01.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA opd yang disyahkan	48	SKPD	48	SKPD	48	SKPD	48	OPD	100%	29	OPD			
4.04. 4.04.01.15.56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	Kemudahan dalam mengakses arsip dokumen anggaran	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	29	OPD	29	OPD	50%
4.04. 4.04.01.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan	100	%			2.500	berkas	2.500	Berkas	100%	2500	berkas	800	berkas	30%
4.04. 4.04.01.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	Tersusunnya data keuangan daerah yang akuntabel										12	bulan	6	Bulan	50%
4.04. 4.04.01.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan	100	%			12	laporan	12	Laporan	100%	100	%			50%

4.04. 4.04.01.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	100	%	12	bulan	12	laporan	12	Laporan	100 %	12	laporan	6	Bulan	50%
4.04. 4.04.01.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Meningkatnya kapasitas pengelola keuangan sekolah dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah										74	Bendah ara sekolah			50%
4.04. 4.04.01.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah										1	kegiata n	1	kegiata n	100%
4.04. 4.04.01.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	100	orang	60	orang	100	orang	100	Orang	100%	100	orang	100	orang	70%
4.04. 4.04.01.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan SP2D	1350	SP2D	1350	SP2D	1.400	SP2D	1.400	SP2D	100%	1350	dokume n	700	dokum en	50%
4.04. 4.04.01.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	88	buku			1	dokume n	1	Dokume n	100%	1	buku			40%
4.04. 4.04.01.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Kelancaran administrasi bansos	100	%	12	bulan	1.500	berkas	1.500	Berkas	100%	100	%			50%
4.04. 4.04.01.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Akuntabilitas keuangan SP2D	100	%			3.000	berkas	3.000	Berkas	100%	4	informa si			50%
4.04. 4.04.01.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	Tersedianya pedoman penganggaran kegiatan	3	dokume n	185	buku	3	dokume n	3	Dokume n	100%	3	dokume n			
4.04. 4.04.01.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan tersedianya lapora			4	laporan	12	laporan	12	Laporan	100%	12	laporan	6	laporan	70%
4.04. 4.04.01.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan _ SP2D					1.400	SP2D	1.400	SP2D	100%	1400	dokume n	800	dokum en	70%
4.04. 4.04.01.15.111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Terciptanyanya sistem penganggaran yang tepat dan sistematis di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Perwal			1	dokum en	1	dokum en	100%	6	Perwal			
4.04. 4.04.01.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya seluruh database pengelolaan keuangan guna memperlancar pelaksanaan tugas.					1	laporan	1	Laporan	100%	12	laporan	6	laporan	50%

4.04.4.04.01.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang Akuntabel										29	OPD			50%
2.18 . 4.04.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah															
4.04. 4.04.01.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	pengamanan arsip dppkd kota magelang					40000	dokumen	40000	Dokumen	100%	6	bidang			70%
4.04 . 4.04.01 . 18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah															
4.04. 4.04.01.18.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	4	laporan	100	wajib pajak	4	laporan	4	Laporan	100%	4 / 1	Laporan / keg			50%
4.04. 4.04.01.18.02	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	Tersusunnya Data Potensi Pajak Daerah	2	laporan	4	laporan	4	laporan	4	Laporan	100%	2	laporan			40%
4.04. 4.04.01.18.03	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	12	Laporan	12	laporan	12	kali	12	Kali	100%	12	laporan	6	laporan	50%
4.04. 4.04.01.18.04	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Tersedianya laporan perkembangan realisasi PAD	12	laporan			12	laporan	12	Laporan	100%	12	laporan	6	laporan	50%
4.04. 4.04.01.18.05	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	Terselesaikannya Tunggakan Pajak Daerah	120	laporan			120	Wajib Pajak	120	data wajib pajak	100%	120	Wajib Pajak	60	Wajib Pajak	50%
4.04. 4.04.01.18.06	Intensifikasi Pemungutan PBB	Tercapainya Target Penerimaan PBB-P2, tercapainya pendistribusian PBB, Pelaksanaan PBB Panutan, dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelurahan, RW, RT, Wajib Pajak	4	kegiatan	4	keg	4	kegiatan	4	Kegiatan	100%	3 / 36200	Keg / SPPT			70%
4.04. 4.04.01.18.07	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	Tertib Administrasi PBB-P2	28	laporan	12	laporan	28	laporan	28	Laporan	100%	28	laporan	17	laporan	50%
4.04. 4.04.01.18.08	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	Tercapainya target PAD	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	6	laporan	60%
4.04. 4.04.01.18.09	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04. 4.04.01.18.10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Tercapainya target PAD	12	laporan			12	laporan	12	Laporan	100%	12	laporan	6	laporan	50%
4.04. 4.04.01.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan	Data piutang PBB-P2	6	bulan	2	jenis	6	bulan	6	Bulan	100	6	bulan		bulan	10%

	Data Piutang PBB	yang valid									%					
4.04. 4.04.01.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya pengelolaan yang akuntabel	12	laporan			12	laporan	12	Laporan	100 %	12	laporan	6	laporan	50%
4.04. 4.04.01.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	meningkatnya pendapatan dan tertib administrasi wajib pajak	20	laporan			200	wajib pajak	200	wajib pajak	100 %	4	LHP WP	4	LHP WP	100%
4.04. 4.04.01.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	terwujudnya tertib administrasi dan terinformasikannya realisasi pencairan dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan					16	laporan	16	Laporan	100 %	16	laporan	10	laporan	60%
4.04. 4.04.01.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	Adanya kenaikan estimasi potensi PBB-P2	100	Objek Pajak			17	kelurahan	17	Kelurahan	100 %	17	kelurahan			50%

4.04. 4.04.01.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Tercapainya target PAD					350	wajib pajak	350	wajib pajak	100 %	540	wajib pajak			50%
4.04. 4.04.01.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terselesaikannya Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	50	SK	50	sk	50	SK	50	SK	100 %	50	SK			40%
4.04. 4.04.01.18.23	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	Terselenggaranya sistem pendapatan daerah yang tepat dan sistematis jajaran pemerintah kota Magelang					1	dokumen	1	Dokumen	100 %					
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah															
4.04. 4.04.01.19.01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Tersedianya data untuk dijual					1	kegiatan	1	Kegiatan	100 %	3	kecamatan			30%
4.04. 4.04.01.19.02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Termanfaatnya aset secara optimal					1	tahun	1	Tahun	100 %	1	kegiatan			10%
4.04. 4.04.01.19.03	Pemusnahan Barang Milik Daerah	Surat persetujuan pemusnahan					1	kegiatan	1	Kegiatan	100 %	1	kegiatan			
4.04. 4.04.01.19.04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Berita acara penelitian dan penjualan dan/atau pemusnahan					3	kegiatan	3	Kegiatan	100 %	4	kegiatan			70%
4.04. 4.04.01.19.06	Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	Jalan di Komplek belakang kantor walikota Magelang					2	jenis	2	Jenis	100 %	1	paket			50%
4.04. 4.04.01.19.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah	Terwujudnya sarana					2	lapangan	2	Lapangan	100	2	lapangan			50%

	Raga	olahraga pengelola barang yang layak dan nyaman						n		n	%		n			
4.04.4.04.01.19.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	meningkatkan kenyamanan tugas				3	unit	3	unit	100%	3	gedung				20%
4.04.4.04.01.19.11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan BMD	12	bulan		12	bulan	12	Laporan	100%	12	bulan	6			50%
4.04.4.04.01.19.12	Penghapusan Asset	Terhapusnya aset-aset pemkot yang sudah tidak layak						1	Paket		2	kegiatan				15%
4.04.4.04.01.19.13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Terpantaunya pengelolaan barang milik daerah	3	kegiatan		16	orang	16	Orang	100%	16	orang	8			60%
4.04.4.04.01.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Tersedianya informasi barang milik daerah	600	%		6	jenis	6	Jenis	100%	6	jenis				60%
4.04.4.04.01.19.15	Penjualan aset daerah	Bertambahnya pendapatan asli daerah	100	%		5	paket	5	Paket	100%	1	paket				40%
4.04.4.04.01.19.16	Penyelamatan aset daerah	Teramankannya aset-aset daerah	1200	%		12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	6			60%
4.04.4.04.01.19.17	Penaksiran barang milik daerah	Tersedianya data dalam rangka tindak lanjut atas aset yang telah ditaksir	400	%		4	kegiatan	4	Kegiatan	100%	4	kegiatan	2			70%
4.04.4.04.01.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan kemampuan petugas pengelola BMD				4	kegiatan	4	Kegiatan	100%	4	kegiatan	2			50%
4.04.4.04.01.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD)				3	kecamatan	3	Kecamatan	100%	7	jenis				20%
4.04.4.04.01.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah				2	dokumen	2	Dokumen	100%	2	dokumen				10%

4.04.4.04.01.19.21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan penatagunaan tanah Pemkot dan tersedianya data tanah Pemkot yang akurat	300	%		300	%	3	Kecamatan	1%	12	kegiatan				10%
4.04.4.04.01.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Terkendalnya pemberian hak atas tanah Negara	100	%		100	%	100	%	100%	100	%				5%
4.04.4.04.01.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot	12	bidang		12	bidang	18	Bidang	100%	12	kegiatan				5%
4.04.4.04.01.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Tersedianya data tanah milik Pemkot yang mutakhir	100	%		1	laporan	1	Laporan	100%	1	kegiatan				5%
4.04.4.04.01.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah	Terwujudnya batas fisik	200	%		2	bidang	2	Bidang	100%	2	kegiatan				30%

	milik Pemda	tanah									%					
4.04. 4.04.01.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan										10	kendaraan			50%
4.04. 4.04.01.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Pembayaran PBB untuk gedung kantor/rumdin/mess tepat waktu	100	%			6	SPPT	6	SPPT	100 %	100	%			80%
4.04. 4.04.01.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Pembayaran PBB tanah milik Pemda	100	%			198	tanah	198	Tanah	100 %	100	%			80%
4.04. 4.04.01.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Terwujudnya rumah dinas dan mess yang layak dan nyaman					6	rumah	6	rumah	100 %	7	Bangunan			30%
4.04. 4.04.01.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas										10	kendaraan			40%
4.04. 4.04.01.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	Terpantaunya Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Tujuan					4	laporan	4	Laporan	100 %	4	laporan			5%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Magelang

Pelaksanaan program kegiatan pada BPKAD Kota Magelang pada Tahun 2018 sebagian besar sesuai dengan Renja BPKAD Tahun 2019 dan dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan, adapun kinerja dari BPKAD Kota Magelang secara detail dapat dilihat pada tabel Laporan Kinerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2018. Adapun laporan kemajuan masing-masing program/ kegiatan pada BPKAD Kota Magelang per 31 Desember 2018 bisa dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.1
Tabel Laporan Kemajuan Kegiatan BPKAD Kota Magelang
Per 31 Desember 2018

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN				
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
Per 31 Desember 2018				
Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Setelah Perubahan Rp	Fisik (%) %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.096.116.000	100	1.810.313.352	86,37
Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	100	997.000	99,70
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	285.662.000	100	185.772.038	65,03
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.900.000	100	13.908.300	73,59
Penyediaan jasa administrasi keuangan	906.986.000	100	765.495.500	84,40
Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.565.000	100	68.558.065	99,99
Penyediaan alat tulis kantor	34.500.000	100	34.485.300	99,96
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.751.000	100	32.548.750	99,38
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.000.000	100	23.954.900	99,81
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	100	19.485.000	97,43
Penyediaan bahan logistik kantor	13.080.000	100	7.827.700	59,84
Penyediaan makanan dan minuman	130.000.000	100	129.041.160	99,26
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260.320.000	100	247.884.083	95,22
Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	169.475.000	100	169.474.272	100,00
Pengelolaan administrasi kepegawaian	130.877.000	100	110.881.284	84,72
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.358.868.000	100	2.133.656.243	90,45
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	476.835.000	100	470.105.000	98,59
Pengadaan peralatan gedung kantor	419.112.000	100	369.749.000	88,22

Pengadaan mebeleur	85.250.000	100	81.983.700	96,17
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	98.135.000	100	93.363.300	95,14
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	372.340.000	100	285.909.543	76,79
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	39.960.000	100	27.275.000	68,26
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	210.175.000	100	175.543.700	83,52
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.200.000	100	6.850.000	95,14
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	649.861.000	100	622.877.000	95,85
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	217.191.000	100	214.851.948	98,92
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	44.000.000	100	43.994.800	99,99
Penyusunan laporan keuangan semesteran	14.100.000	100	14.034.500	99,54
Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.000.000	100	6.990.200	99,86
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	48.510.000	100	48.131.500	99,22
Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	92.930.000	100	91.158.948	98,09
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	10.651.000	100	10.542.000	98,98
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.450.614.000	100	5.897.071.736	91,42
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	38.520.000	100	35.997.600	93,45
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	463.228.000	100	408.241.327	88,13
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	240.892.000	100	195.111.500	81,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	367.550.000	100	327.317.500	89,05
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	343.453.000	100	293.254.000	85,38
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	200.078.000	100	188.505.500	94,22
Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	467.753.000	100	446.103.300	95,37
Pembuatan Daftar Gaji	129.594.000	100	128.897.000	99,46
Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	54.180.000	100	50.790.000	93,74
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang	192.213.000	100	184.092.550	95,78

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				
Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	31.805.000	100	31.602.400	99,36
Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	190.884.000	100	178.959.800	93,75
Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	111.590.000	100	108.832.100	97,53
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	250.215.000	100	221.943.669	88,70
Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	40.744.000	100	40.680.700	99,84
Penyusunan laporan posisi kas daerah	33.900.000	100	33.832.100	99,80
Penyusunan Kebijakan Umum APBD	212.945.000	100	190.945.050	89,67
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	94.308.000	100	89.739.400	95,16
Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	185.093.000	100	155.077.000	83,78
Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	95.268.000	100	81.609.500	85,66
Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	41.576.000	100	33.927.000	81,60
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	49.280.000	100	40.457.000	82,10
Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	151.116.000	100	149.970.500	99,24
Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	146.321.000	100	142.982.150	97,72
Pengesahan dan penerbitan SPD	76.600.000	100	72.578.700	94,75
Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	254.044.000	100	240.786.660	94,78
Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	123.696.000	100	115.134.130	93,08
Pengendalian dan penerbitan SPM	35.245.000	100	35.203.000	99,88
Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	69.410.000	100	65.942.300	95,00
Penyusunan laporan pajak	88.660.000	100	75.939.000	85,65
Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	36.688.000	100	34.967.216	95,31
Penyusunan anggaran kas	29.558.000	100	27.583.596	93,32
Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	43.570.000	100	40.155.000	92,16
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	48.676.000	100	40.951.000	84,13
Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	40.391.000	100	34.820.925	86,21
Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	159.202.000	100	156.511.328	98,31
Penyusunan data keuangan daerah	99.608.000	100	87.750.966	88,10
Pengelolaan dan	118.459.000	100	108.381.694	91,49

pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan				
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	61.118.000	100	60.895.400	99,64
Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	230.009.000	100	226.436.000	98,45
Workshop pengelolaan keuangan daerah	77.993.000	100	73.380.000	94,09
Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	304.595.000	100	239.896.375	78,76
Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	56.925.000	100	56.513.000	99,28
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	55.880.000	100	50.737.500	90,80
Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	115.451.000	100	114.808.800	99,44
Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	80.728.000	100	72.328.000	89,59
Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	111.602.000	100	106.502.500	95,43
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	124.850.000	100	117.722.900	94,29
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	124.850.000	100	117.722.900	94,29
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.099.144.000	100	2.958.592.885	95,46
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	500.158.000	100	484.130.720	96,80
Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	40.263.000	100	38.262.350	95,03
Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	51.731.000	100	51.301.500	99,17
Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	126.500.000	100	125.028.700	98,84
Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	160.783.000	100	146.685.000	91,23
Intensifikasi Pemungutan PBB	376.705.000	100	357.844.800	94,99
Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	200.160.000	100	197.896.500	98,87
Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	122.929.000	100	121.970.900	99,22
Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	400.189.000	100	370.741.282	92,64

Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	81.099.000	100	80.912.950	99,77
Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	145.613.000	100	132.829.000	91,22
Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	113.247.000	100	112.277.794	99,14
Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	73.920.000	100	73.512.400	99,45
Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	133.806.000	100	132.225.300	98,82
Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	286.946.000	100	257.065.850	89,59
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	65.992.000	100	60.829.500	92,18
Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	103.680.000	100	102.197.000	98,57
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	79.538.000	100	77.794.039	97,81
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	35.885.000	100	35.087.300	97,78
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.721.259.000	100	5.078.706.911	88,77
Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	33.305.000	100	30.778.000	92,41
Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	110.366.000	100	101.420.200	91,89
Pemusnahan Barang Milik Daerah	261.408.000	100	237.461.250	90,84
Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	24.090.000	100	22.888.750	95,01
Pengadaan Mebeleur	15.890.000	100	14.856.600	93,50
Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	530.616.000	100	505.837.700	95,33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	300.646.000	100	280.838.021	93,41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	427.214.000	100	311.322.607	72,87
Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	142.444.000	100	124.465.000	87,38
Penghapusan Asset	77.588.000	100	63.405.000	81,72
Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	493.837.000	100	461.773.459	93,51
Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	145.400.000	100	134.239.200	92,32
Penjualan asset daerah	94.948.000	100	83.753.000	88,21
Penyelamatan asset daerah	214.490.000	100	202.665.735	94,49
Penaksiran barang milik daerah	98.543.000	100	92.802.931	94,18
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	137.144.000	100	116.977.468	85,30
Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	123.735.000	100	88.305.500	71,37
Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	124.086.000	100	119.517.600	96,32
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan	54.452.000	100	49.622.200	91,13

pemanfaatan tanah				
Peningkatan status tanah yang dimohon warga	39.700.000	100	34.121.500	85,95
Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	320.627.000	100	230.314.255	71,83
Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	175.854.000	100	166.458.500	94,66
Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	13.770.000	100	8.237.600	59,82
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	30.463.000	100	21.966.870	72,11
Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30.400.000	100	25.738.633	84,67
Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	62.918.000	100	52.646.859	83,68
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	634.331.000	100	552.665.440	87,13
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	452.463.000	100	414.392.333	91,59
Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	58.453.000	100	52.309.000	89,49
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Barang Pengelola	84.287.000	100	77.250.000	91,65
Pembangunan Gedung Kantor Barang Pengelola	407.791.000	100	399.675.700	98,01
TOTAL	20.068.042.000	100	18.210.915.975	90,75

Sedangkan apabila dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja BPKAD Tahun 2018 dan proyeksi capaian kinerja Tahun 2019 sampai dengan triwulan I secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Derajat otonomi fiskal	-	-	31,96%	33,88%	35,62%	31,96%	35,55%	34,80%	37,96%	39,62	
2.	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	-	-	67,45%	65,79%	63,65%	67,45%	67,57%	61,18%	62,82%	59,78%	
3.	Rasio pajak daerah terhadap PAD	-	-	13,24%	13,48%	12,56%	12,33%	11,51%	13,36%	12,95%	14,83%	
4.	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	-	-	3,12 %	4,20 %	3,63 %	3,33 %	3,03%	2,67%	2,18%	2,54%	
5.	Prosentase pertumbuhan PAD	-	-	16,57 %	18,44%	19,18 %	12,83 %	17,97%	5,67%	7,32%	9,07%	
6.	Penerapan ASB dalam proses penganggaran	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %		
7.	Persetujuan Raperda tentang APBD	-	-	Minggu I Oktober s/d 31 November		Minggu IV November	-					
8.	Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan	-	-	Minggu II September s/d akhir September		Minggu IV September	-					
9.	Prosentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

	pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung											
10.	Jumlah sisdu pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	-	-	1	1	5	5	1	5	-		
11.	Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	-	-	78%	81%	84%	87%	100%	100%	100%		
12.	Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD	-	-	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli		Juni	Evaluasi Gubernur		
13.	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang			55%	60%	65%	70%	58,83%	72,44%	74,36%	76,18%	
14.	Barang Milik yang didayagunakan			100%	100%	100%	100%		100%	100%		
15.	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu			50%	50%	75%	100%		100%	89,65%		
16.	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu			50%	100%	100%	100%		100%	100%		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Magelang

Bahwa dengan terbitnya PP nomor 12 tahun 2019 sebagai pengganti PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan-perubahan tentang pengelolaan keuangan di daerah. Melihat hal tersebut, maka pemerintah Kota Magelang pada tahun 2020 melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Sebagai tindak lanjut adanya perubahan perda tersebut, maka ketentuan-ketentuan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan juga disesuaikan. Hal ini direncanakan dilaksanakan pada tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021

Terkait dengan pemberlakuan perubahan pada PP Nomor 12 tahun 2019 terhadap proses penganggaran daerah, diberlakukan untuk penganggaran tahun anggaran 2021. Mensikapi hal tersebut, terkait system informasi penganggaran yang telah ada saat ini, dengan adanya perubahan pengelolaan keuangan maka pada tahun 2020 ini akan dipersiapkan dengan tetap berpedoman pada arahan/ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan.

Adapun hambatan dan langkah antisipatif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	RESIKO/ HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPATIF
1.	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang harus segera diterapkan	- Menyusun Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasinya secara kontinyu.
2.	Masih terdapat pajak/retribusi daerah yang belum bisa diterapkan penerimaannya melalui online atau transaksi secara non tunai, misal Pajak Bumi dan Bangunan serta Retribusi Parkir. Hal ini dikarenakan kompleksitas penanganan pajak/retribusi itu sendiri, misalnya adalah jumlah wajib pajak yang sangat banyak dan nominal	- Pengumpulan data penerimaan pajak/retribusi daerah secara riil time - Peningkatan pembinaan/edukasi terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi - Peningkatan penerapan teknologi

	pembayaran yang terlalu kecil	
3.	Belum optimalnya pengelolaan asset maupun Barang Milik Daerah yang terdapat pada OPD-OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan, rekonsiliasi, dan asistensi secara kontinyu kepada para Pengurus Barang di OPD-OPD - Melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan BMD yang ada, terutama Sistem Informasi Persediaan Barang

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa penyusunan Renja BPKAD telah mendasar pada rancangan awal RKPD Tahun 2018 dan secara fokus mengakomodir hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab BPKAD.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis.

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Pada Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada. dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif. Tetapi untuk usulan program dan kegiatan secara keseluruhan tidak berubah. Hanya ada 1 (satu)

penambahan kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu Kegiatan Penyusunan Perubahan Renstra OPD yang merupakan penambahan kegiatan seragam untuk OPD sekota Magelang guna mengampu perubahan-perubahan target, sasaran, maupun indikator-indikator kegiatan yang terdapat pada OPD-OPD yang muaranya adalah mendukung target sasaran maupun indikator pada RPJMD Kota Magelang 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Sedangkan kalau dilihat dari rancangan awal RKPD 2018, pagu BPKAD adalah sebesar Rp 19.027.767.000,- (Sembilan belas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dan pada rancangan akhir bertambah sebesar Rp. 10.045.000,- (sepuluh juta empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 19.037.812.000,- (sembilan belas milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Penambahan tersebut terdapat pada penambahan 1(satu) kegiatan seperti yang disebutkan di atas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.4 berikut :

tabel 2.4. 1Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Pemerintah Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.144.277.000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.144.277.000	
1	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	BPKAD	laporan bulanan	12 laporan	104.314.000	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	BPKAD	laporan bulanan	12 laporan	104.314.000	
2	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	BPKAD	perwal ASB	1 perwal	105.000.000	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	BPKAD	perwal ASB	1 perwal	105.000.000	
3	Penyusunan laporan posisi kas daerah	BPKAD	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	43.486.000	Penyusunan laporan posisi kas daerah	BPKAD	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	43.486.000	
4	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	laporan database BPKAD	4 laporan	29.726.000	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	laporan database BPKAD	4 laporan	29.726.000	
5	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	BPKAD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	219.568.000	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	BPKAD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	219.568.000	
6	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	BPKAD	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 Laporan	76.264.000	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	BPKAD	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 Laporan	76.264.000	
7	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD	rancangan perda tentang APBD	1 raperda	443.834.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD	rancangan perda tentang APBD	1 raperda	443.834.000	
8	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	rancangan perwal tentang APBD	3 dokumen	243.813.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	rancangan perwal tentang APBD	3 dokumen	243.813.000	
9	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang	BPKAD	rancangan perda tentang perubahan	1 raperda	372.118.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang	BPKAD	rancangan perda tentang perubahan	1 raperda	372.118.000	

	Perubahan APBD		APBD			Perubahan APBD		APBD			
10	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 raperwal	344.011.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 raperwal	344.011.000	
11	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	BPKAD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	216.373.000	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	BPKAD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	216.373.000	
12	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	93.755.000	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	93.755.000	
13	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	BPKAD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	186.717.000	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	BPKAD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	186.717.000	
14	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	97.115.000	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	97.115.000	
15	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	43.359.000	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	43.359.000	
16	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	50.700.000	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	50.700.000	
17	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	BPKAD	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului	29 OPD	74.783.000	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	BPKAD	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului	29 OPD	74.783.000	

			perubahan, pengelolaan anggaran					perubahan, pengelolaan anggaran			
18	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	BPKAD	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	37.890.000	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	BPKAD	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	37.890.000	
19	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	46.627.000	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	46.627.000	
20	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	49.916.000	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	49.916.000	
21	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	BPKAD	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	225.631.000	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	BPKAD	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	225.631.000	
22	Workshop pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	73 pegawai	80.517.000	Workshop pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	73 pegawai	80.517.000	
23	Penyusunan data keuangan daerah	BPKAD	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	95.583.000	Penyusunan data keuangan daerah	BPKAD	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	95.583.000	

24	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	BPKAD	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	128.959.000	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	BPKAD	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	128.959.000	
25	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	BPKAD	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang	3000 SP2D	158.713.000	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	BPKAD	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D	3000 SP2D	158.713.000	

			tereintegrasi)					OPD yang tereintegrasi)			
26	Pengesahan dan penerbitan SPD	BPKAD	SPD yang diterbitkan	10 jenis	56.488.000	Pengesahan dan penerbitan SPD	BPKAD	SPD yang diterbitkan	10 jenis	56.488.000	
27	Pengendalian dan penerbitan SPM	BPKAD	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	700 SPM	34.465.000	Pengendalian dan penerbitan SPM	BPKAD	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	700 SPM	34.465.000	
28	Penyusunan anggaran kas	BPKAD	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	10 kegiatan	29.805.000	Penyusunan anggaran kas	BPKAD	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	10 kegiatan	29.805.000	
29	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	BPKAD	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	800 berkas	146.514.000	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	BPKAD	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	800 berkas	146.514.000	
30	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	BPKAD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	41.699.000	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	BPKAD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	41.699.000	
31	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	BPKAD	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1500 berkas	111.920.000	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	BPKAD	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1500 berkas	111.920.000	
32	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	BPKAD	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	27.442.000	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	BPKAD	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	27.442.000	
33	Pembuatan Daftar Gaji	BPKAD	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	140.821.000	Pembuatan Daftar Gaji	BPKAD	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	140.821.000	
34	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	232.322.000	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	232.322.000	
35	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	BPKAD	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	207.514.000	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	BPKAD	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	207.514.000	

36	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	BPKAD	laporan keuangan OPD yang diteliti	348 laporan OPD	115.835.000	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	BPKAD	laporan keuangan OPD yang diteliti	348 laporan OPD	115.835.000	
37	Penyusunan laporan pajak	BPKAD	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	108.527.000	Penyusunan laporan pajak	BPKAD	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	108.527.000	

38	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	BPKAD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	61.118.000	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	BPKAD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	61.118.000	
39	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	249.975.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	249.975.000	
40	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	BPKAD	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	42.546.000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	BPKAD	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	42.546.000	
41	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	480.853.000	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	480.853.000	
42	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	34.784.000	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	34.784.000	
43	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	56.356.000	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	56.356.000	
44	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	200.028.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	200.028.000	
45	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perwal	196.493.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perwal	196.493.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem				208.968.000	Program peningkatan pengembangan sistem				219.013.000	

	pelaporan capaian kinerja dan keuangan					pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	BPKAD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	45.218.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	BPKAD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	45.218.000	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPKAD	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 jenis laporan	13.613.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPKAD	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 jenis laporan	13.613.000	
3	Penyusunan Rencana Kerja OPD	BPKAD	renja penetapan dan renja perubahan	2 jenis dokumen	7.968.000	Penyusunan Rencana Kerja OPD	BPKAD	renja penetapan dan renja perubahan	2 jenis dokumen	7.968.000	
4	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	BPKAD	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	108.755.000	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	BPKAD	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	108.755.000	

5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	BPKAD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6.166.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	BPKAD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6.166.000	
6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	BPKAD	RKA dan RKPA	2 dokumen	27.248.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	BPKAD	RKA dan RKPA	2 dokumen	27.248.000	
7						Penyusunan Rencana Strategis OPD	BPKAD	Terwujudnya perubahan Renstra OPD	1 Dokumen	10.045.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.007.614.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.007.614.000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD	surat masuk dan keluar	12 bulan	1.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD	surat masuk dan keluar	12 bulan	1.000.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12 bulan	365.120.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12 bulan	365.120.000	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	jasa tenaga administrasi keuangan	12 bulan	806.229.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	jasa tenaga administrasi keuangan	12 bulan	806.229.000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	perpanjangan STNK dan KIR pick up	65 kendaraan	24.190.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	perpanjangan STNK dan KIR pick up	65 kendaraan	24.190.000	

5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60.564.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60.564.000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	34.500.000	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	34.500.000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	25.971.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	25.971.000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5.926.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5.926.000	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	tersedianya bahan bacaan	3 jenis	5.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	tersedianya bahan bacaan	3 jenis	5.400.000	
10	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD	tersedianya logistik kantor	3 jenis	10.127.000	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD	tersedianya logistik kantor	3 jenis	10.127.000	
11	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	105.862.000	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	105.862.000	
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	koordinasi antar daerah	12 bulan	281.190.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	koordinasi antar daerah	12 bulan	281.190.000	
13	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	BPKAD	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak / honorer daerah	169.479.000	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	BPKAD	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak / honorer daerah	169.479.000	

14	Pengelolaan administrasi kepegawaian	BPKAD	laporan administrasi kepegawaian	82 file	112.056.000	Pengelolaan administrasi kepegawaian	BPKAD	laporan administrasi kepegawaian	82 file	112.056.000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.307.089.000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.307.089.000	
1	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	BPKAD	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	145.187.000	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	BPKAD	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	145.187.000	
2	Digitasi peta dan	BPKAD	Peta obyek pajak	1 peta	219.676.000	Digitasi peta dan	BPKAD	Peta obyek pajak	1 peta	219.676.000	

	pemutakhiran data obyek pajak		PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	obyek pajak PBB		pemutakhiran data obyek pajak		PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	obyek pajak PBB		
3	Implementasi Tapping Box	BPKAD	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	100 laporan	93.643.000	Implementasi Tapping Box	BPKAD	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	100 laporan	93.643.000	
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4 laporan, 1 pameran	317.051.000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4 laporan, 1 pameran	317.051.000	
5	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	BPKAD	laporan potensi subyek dan obyek pajak	4 laporan	50.759.000	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	BPKAD	laporan potensi subyek dan obyek pajak	4 laporan	50.759.000	
6	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	BPKAD	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 1200 wajib pajak	134.202.000	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	BPKAD	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 1200 wajib pajak	134.202.000	
7	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	139.672.000	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	139.672.000	
8	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	BPKAD	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 data wajib pajak	162.879.000	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	BPKAD	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 data wajib pajak	162.879.000	
9	Intensifikasi Pemungutan PBB	BPKAD	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan, 36200 SPPT	317.964.000	Intensifikasi Pemungutan PBB	BPKAD	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi	3 kegiatan, 36200 SPPT	317.964.000	

								SPPT			
10	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	BPKAD	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	418.906.000	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	BPKAD	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	418.906.000	

11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	BPKAD	penghapusan data piutang	12 bulan	166.329.000	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	BPKAD	penghapusan data piutang	12 bulan	166.329.000	
12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 bulan	107.654.000	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 bulan	107.654.000	
13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	BPKAD	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	6 LHP atas wajib pajak	56.028.000	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	BPKAD	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	6 LHP atas wajib pajak	56.028.000	
14	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	BPKAD	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	281.093.000	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	BPKAD	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	281.093.000	
15	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	BPKAD	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.683.000	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	BPKAD	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.683.000	
16	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	BPKAD	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	199.667.000	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	BPKAD	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	199.667.000	
17	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	BPKAD	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	140.237.000	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	BPKAD	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain	16 laporan	140.237.000	

								pendapatan			
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	BPKAD	jumlah peserta	540 wajib pajak	54.674.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	BPKAD	jumlah peserta	540 wajib pajak	54.674.000	
19	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	53.162.000	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	53.162.000	
20	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	BPKAD	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	144.623.000	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	BPKAD	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	144.623.000	

	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				697.303.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				697.303.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	gedung yang terpelihara	1 unit	84.157.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	gedung yang terpelihara	1 unit	84.157.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	jumlah kendaraan dinas terpelihara	52 unit	359.912.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	jumlah kendaraan dinas terpelihara	52 unit	359.912.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	perlengkapan gedung yang terpelihara	39 unit	36.984.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	perlengkapan gedung yang terpelihara	39 unit	36.984.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	207.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	207.000.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPKAD	jumlah mebeleur yang diperbaiki	37 buah	9.250.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPKAD	jumlah mebeleur yang diperbaiki	37 buah	9.250.000	

	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				150.858.000	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				150.858.000	
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	BPKAD	jumlah arsip yang tertata	40000 dokumen	150.858.000	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	BPKAD	jumlah arsip yang tertata	40000 dokumen	150.858.000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				6.511.658.000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				6.511.658.000	
1	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	BPKAD	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	66.900.000	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	BPKAD	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	66.900.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	BPKAD	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	18 unit	433.984.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	BPKAD	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	18 unit	433.984.000	
3	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	BPKAD	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	58.476.000	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	BPKAD	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	58.476.000	
4	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	BPKAD	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	40.000.000	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	BPKAD	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	40.000.000	
5	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Pengelolaan BMD	13 orang	489.250.000	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Pengelolaan BMD	13 orang	489.250.000	
6	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	BPKAD	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	BPKAD	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	
7	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	

8	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	BPKAD	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian,	120.925.000	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	BPKAD	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian,	120.925.000	
---	---	-------	-------------------------	--	-------------	---	-------	-------------------------	--	-------------	--

				tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)					tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)		
9	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	BPKAD	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	39.693.000	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	BPKAD	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	39.693.000	
10	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	laporan barang milik daerah	8 jenis laporan	184.765.000	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	laporan barang milik daerah	8 jenis laporan	184.765.000	
11	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	BPKAD	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 pejabat pengelolan barang	92.220.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	BPKAD	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 pejabat pengelolan barang	92.220.000	
12	Penyelamatan asset daerah	BPKAD	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	124.516.000	Penyelamatan asset daerah	BPKAD	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	124.516.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	BPKAD	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan bulanan	215.080.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	BPKAD	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan bulanan	215.080.000	
14	Penghapusan Asset	BPKAD	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	78.678.000	Penghapusan Asset	BPKAD	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	78.678.000	
15	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	BPKAD	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	52.521.000	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	BPKAD	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	52.521.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	BPKAD	data barang milik daerah yang mutakhir	12 kegiatan	142.444.000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	BPKAD	data barang milik daerah yang mutakhir	12 kegiatan	142.444.000	
17	Penaksiran barang milik daerah	BPKAD	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7 rumah dinas/mess	628.612.000	Penaksiran barang milik daerah	BPKAD	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7 rumah dinas/mess	628.612.000	
18	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	BPKAD	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	72.941.000	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	BPKAD	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	72.941.000	
19	Penjualan asset daerah	BPKAD	tersedianya berita acara penelitian	4 kegiatan	25.617.000	Penjualan asset daerah	BPKAD	tersedianya berita acara penelitian	4 kegiatan	25.617.000	

			untuk penjualan dan/atau pemusnahan					untuk penjualan dan/atau pemusnahan			
20	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	92.230.000	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	92.230.000	

21	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	BPKAD	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	18 unit	40.400.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	BPKAD	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	18 unit	40.400.000	
22	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	BPKAD	nilai dasar penjualan BMD	3 kegiatan	55.027.000	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	BPKAD	nilai dasar penjualan BMD	3 kegiatan	55.027.000	
23	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	BPKAD	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	11 kegiatan	115.696.000	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	BPKAD	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	11 kegiatan	115.696.000	
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKAD	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3 gedung kantor	354.195.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKAD	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3 gedung kantor	354.195.000	
25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	BPKAD	tanah yang diukur	2 bidang	18.070.000	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	BPKAD	tanah yang diukur	2 bidang	18.070.000	
26	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot	3 Kecamatan	54.636.000	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot	3 Kecamatan	54.636.000	
27	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	BPKAD	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang	1 Perwal	47.575.000	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	BPKAD	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang	1 Perwal	47.575.000	
28	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah	2 Bus	2.450.961.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah	2 Bus	2.450.961.000	
	JUMLAH				19.027.767.000	JUMLAH				19.037.812.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPKAD merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum fungsi penunjang, yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Namun demikian terkait dengan usulan aloksi untuk hibah dan bansos yang berupa uang, BPKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak langsung berdasar rekomendasi dari OPD pengampu hibah bansos sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.

2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2020 BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah disampaikan pada Bab III RPJMD, BPKAD Kota Magelang mendukung untuk mewujudkan visi **“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**, adapun telaah dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kota Jasa

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2. Kota Modern

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).

3. Kota Cerdas

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) *Smart Economy*, yaitu: pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif; (4) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

4. Masyarakat Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pementapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

5. Masyarakat Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya

pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, BPKAD bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi kota jasa yang modern dan cerdas, dengan mendukung Misi 1 *“Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 1 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas.

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif, dengan indikator :

- Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP

Tujuan 3 : Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan.

Sasaran 5 : Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator :

- Derajat Otonomi Fiskal
- Rasio Ketergantungan Keuangan terhadap Dana Pusat

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka BPKAD sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatannya pada bidang-bidang guna mencapai indikator sasaran tersebut.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang direncanakan BPKAD Kota Magelang untuk dilaksanakan pada tahun 2020 adalah terdiri dari 7 program dan 125 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program ini bertujuan untuk melaksanakan serta meningkatkan tata kelola arsip daerah yang terdapat pada OPD. Pagu yang direncanakan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.658.000,-.
2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Pada tahun 2020 untuk melaksanakan program ini diusulkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.007.614.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas, efisiensi serta peningkatan kinerja. Untuk program ini diusulkan pagu sebesar Rp. 697.303.000,-.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan sehingga dapat menyelenggarakan tugas maupun urusan pemerintahan dengan optimal. Pada tahun 2020 diusulkan pagu sebesar Rp. 219.013.000,-

5. Program Peningkatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan dalam mengelola Laporan Keuangan Daerah. Pada rencana tahun 2020 diusulkan pagu sebesar Rp. 6.144.277.000,- untuk pagu ini.
6. Program Peningkatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan dalam mengelola pendapatan daerah. Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program ini diusulkan pagu sebesar Rp. 3.307.089.000,-
7. Program Peningkatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan dalam mengelola barang milik daerah dan juga asset-aset milik Pemerintah Kota Magelang. Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program ini diusulkan pagu sebesar Rp. 6.511.658.000,-.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD. Program, kegiatan dan pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan BPKAD Kota Magelang bisa dilihat pada tabel matriks rencana kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 yang tertuang pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKAT IF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			308,009,680		349,441,616	887,324,000		398,169,939				
1	4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	100	134,350,000	12 laporan	141,050,000	108,736,000	12 laporan	148,100,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	3	173,659,680	1 perwal	208,391,616	0	1 perwal	250,069,939	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

3	4.4.15.13 7	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD					281,145,000	2 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan			12 laporan		48,542,000	12 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.11 4	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD			4 laporan		30,022,000	4 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.11 5	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi			29 OPD		204,763,000	29 OPD	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.13 4	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK			7 Laporan		73,224,000	7 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.13 8	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah					140,892,000	1 Perda	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			9,646,349,840		3,161,770,096	2,082,496,000		3,594,617,516				
1	4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	4	450,000,000	1 raperda	495,000,000	350,107,000	1 Raperda	544,500,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	3	351,216,000	3 dokumen	421,459,000	274,771,000	1 dokumen	465,000,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	4	3,898,700,000	1 raperda	428,438,000	297,489,000	1 Raperda	475,000,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	4	3,853,200,000	2 raperwal	423,850,000	348,146,000	2 Raperwal	466,239,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

5	4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2	248,200,000	2 dokumen	273,100,000	182,517,000	2 dokumen	300,000,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2	137,659,000	2 dokumen	165,191,000	92,086,000	2 dokumen	198,200,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2	280,785,600	2 dokumen	336,942,720	155,605,000	2 dokumen	404,331,264	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2	130,014,720	2 dokumen	156,017,664	94,697,000	2 dokumen	187,221,197	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	48	41,554,000	29 OPD	82,439,424	45,763,000	29 OPD	98,927,309	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	48	48,158,000	29 OPD	80,326,080	46,302,000	29 OPD	96,391,296	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	100	79,719,000	29 OPD	78,312,960	73,464,000	29 OPD	93,975,552	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2	30,827,520	2 laporan	36,993,024	33,364,000	2 laporan	44,391,629	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	48	44,667,000	29 OPD	85,377,024	43,151,000	29 OPD	102,452,429	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	48	51,649,000	29 OPD	98,323,200	45,034,000	29 OPD	117,987,840	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			492,620,000		487,118,000	398,436,000		521,217,000				

1	4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	3	405,753,000	74 sekolah	434,156,000	223,737,000	74 sekolah	464,547,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	6	49,497,000	73 pegawai	52,962,000	91,850,000	60 pegawai	56,670,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	100	37,370,000	12 laporan	0	82,849,000	12 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1,059,964,000		1,129,800,000	1,012,303,000		1,236,800,000			
1	4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	370	175,829,000	6 laporan	221,500,000	155,965,000	6 laporan	238,500,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregistrasi)	100	172,601,000	3000 SP2D	247,000,000	168,256,000	3000 SP2D	271,000,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	100	82,303,000	10 jenis	109,000,000	71,550,000	29 OPD	119,900,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	100	24,386,000	700 SPM	0	32,848,000	700 SPM	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	100	18,553,000	10 kegiatan	24,600,000	12,875,000	29 OPD	27,000,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
6	4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	100	203,814,000	800 berkas	235,000,000	168,516,000	800 berkas	258,500,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

		dan Tak Terduga												
7	4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1350	75,706,000	1100 SP2D	110,000,000	117,468,000	1100 SP2D	121,000,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	100	134,973,000	1500 berkas	147,000,000	122,393,000	1500 berkas	161,700,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	100	26,925,000	4 jenis dokumen	35,700,000	25,125,000	4 jenis dokumen	39,200,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	1400	144,874,000	470 daftar gaji	0	137,307,000	470 daftar gaji	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1,596,430,500		1,270,276,500	1,468,086,000		1,391,132,000				
1	4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	3	295,064,000	1 aplikasi	356,163,500	213,226,000	1 aplikasi	391,779,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	612	214,755,000	12 dokumen	226,510,000	205,832,000	12 dokumen	249,161,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	552	129,766,500	348 laporan OPD	90,100,000	100,658,000	348 laporan OPD	96,300,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	84	92,260,000	12 laporan	127,896,000	98,652,000	12 laporan	140,685,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	100	58,023,000	12 laporan	67,170,000	76,673,000	12 laporan	70,525,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	100	257,634,000	120 orang	328,570,000	232,681,000	120 orang	361,427,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

7	4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	88	59,170,000	1 dokumen	73,867,000	43,354,000	1 dokumen	81,255,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12	452,253,000	12 laporan	0	441,280,000	12 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	1	37,505,000	2 kegiatan	0	55,730,000	2 kegiatan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			239,892,100		354,195,677	210,280,000		389,614,368				
1	4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12	60,355,000	12 dokumen	123,483,525	43,110,000	12 laporan	135,831,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	3	14,116,000	2 jenis laporan	15,571,369	13,687,000	2 laporan	17,128,506	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2	23,541,100	2 jenis dokumen	25,895,210	8,100,000	2 dokumen	28,484,731	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	12	81,292,000	1500 berkas	107,870,895	107,412,000	1500 berkas	118,657,985	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	12,851,000	1 dokumen	19,340,761	6,172,000	1 dokumen	21,274,837	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2	47,737,000	2 dokumen	62,033,917	31,799,000	2 dokumen	68,237,309	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			108,927,000		114,373,350	366,124,000		120,092,017				
1	4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12	1,102,500	12 bulan	1,157,625	1,000,000	12 bulan	1,215,506	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

2	4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12	107,824,500	12 bulan	113,215,725	365,124,000	12 bulan	118,876,511	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,130,572,000		2,094,874,697	1,594,049,000		2,226,638,484				
1	4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12	887,406,000	12 bulan	854,528,000	856,656,000	12 bulan	897,256,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	64	30,530,000	65 kendaraan	21,670,740	20,440,000	39 kendaraan	22,754,277	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	12	97,576,000	22 jenis/item	60,249,751	63,423,000	22 jenis/item	63,262,238	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	41,000,000	48 jenis	47,462,625	34,401,000	48 jenis	49,835,756	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	32,751,000	15 jenis	36,928,238	25,946,000	15 jenis	38,774,649	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	12	44,422,800	17 jenis	31,718,925	7,599,000	22 jenis	33,304,871	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	2	20,000,000	3 jenis	44,452,800	15,400,000	3 jenis	46,675,440	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	24	12,672,000	3 jenis	4,167,450	7,880,000	3 jenis	4,375,823	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	107,004,000	12 bulan	112,604,499	115,762,000	12 bulan	118,234,724	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12	285,545,000	12 bulan	250,427,859	185,354,000	12 bulan	262,949,252	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	23	446,665,200	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	540,369,060	174,211,000	3 orang jaga malam, 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	594,405,966	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

12	4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82	125,000,000	82 file	90,294,750	86,977,000	82 file	94,809,488	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			56,356,000		75,900,000	47,005,000		83,400,000				
1	4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1	56,356,000	1 dokumen	75,900,000	47,005,000	1 dokumen	83,400,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			407,954,000		567,629,000	372,431,000		624,391,000				
1	4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	520	206,558,000	1 perda	284,350,000	199,979,000	1 perda	312,785,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	120	201,396,000	1 perwal	283,279,000	172,452,000	1 perwal	311,606,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2,467,008,000		2,963,642,619	3,321,697,000		3,236,630,093				
1	4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT			36200 SPPT		130,700,000	36200 SPPT	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan			1 peta obyek pajak PBB		219,701,000	1 peta obyek pajak PBB	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak			100 laporan		93,595,000	100 laporan	0	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

4	4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4	239,782,000	4 laporan, 1 pameran	333,801,169	312,639,000	4 laporan 1 pameran	350,491,227	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	2	38,463,000	4 laporan	44,315,645	50,739,000	4 laporan	48,747,210	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB			12 laporan, 1200 wajib pajak		121,456,000	12 laporan, 1200 WP	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
7	4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12	126,500,000	12 laporan	200,714,800	146,757,000	12 laporan	220,786,280	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120	188,053,000	120 data wajib pajak	156,443,078	162,878,000	120 wajib pajak	172,087,386	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
9	4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	4	281,448,000	3 kegiatan, 36200 SPPT	396,369,138	314,563,000	3 kegiatan, 36200 SPPT	436,006,052	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
10	4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12	406,219,000	12 bulan	515,854,339	375,922,000	12 laporan	567,439,773	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
11	4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	6	195,613,000	12 bulan	375,891,703	166,329,000	12 laporan	413,480,873	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
12	4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12	135,250,000	12 bulan	133,734,628	116,936,000	12 laporan	140,421,360	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
13	4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	20	51,357,000	6 LHP atas wajib pajak	64,096,967	63,228,000	6 LHP atas wajib pajak	70,506,664	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

14	4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	100	281,946,000	17 kelurahan	355,438,226	275,888,000	17 kelurahan	390,982,049	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50	119,916,000	50 SK	84,539,796	103,580,000	50 SK	92,993,776	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28	207,360,000	28 laporan	302,443,130	199,351,000	28 laporan	332,687,443	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16	140,049,000	16 laporan	0	123,350,000	16 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta		55,052,000	540 wajib pajak	0	54,670,000	540 wajib pajak	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.18.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Jasa Usaha			1 Raperda		61,481,000	1 raperda	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	4.4.18.20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal Pajak Daerah, Perwal Retribusi Daerah, Perwal BPHTB			1 perwal		35,885,000	1 perwal	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
21	4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah			12 laporan		53,058,000	12 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	4.4.18.31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT			800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame,		138,991,000	800 skpd reklame 960 skpd PAT 12 laporan reklame 12 laporan PAT	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

						12 Laporan Penatausahaan PAT								
	4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1,135,339,563		926,736,694	529,340,000		973,073,528				
1	4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1	80,415,000	1 unit	84,101,456	10,922,000	1 unit	88,306,529	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	64	784,767,000	52 unit	528,455,813	308,068,000	50 unit	554,878,603	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	33	24,282,563	39 unit	25,496,691	27,400,000	39 unit	26,771,525	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	7	238,675,000	6 jenis	280,347,834	173,700,000	9 jenis	294,365,226	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	20	7,200,000	37 buah	8,334,900	9,250,000	27 buah	8,751,645	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, printer, scanner, ups		0	10 buah	0	0	4 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, camera, mesin penghancur kertas			12 buah		0	2 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.2.10	Pengadaan mebeleur	meja rapat, kursi rapat, karpet					0	3 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			139,610,000		157,600,000	149,099,000		165,500,000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				

			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	6	139,610,000	40000 dokumen	157,600,000	149,099,000	4000 dokumen	165,500,000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0		0	3,926,989,000		0				
1	4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda			223 bidang		66,900,000	223 bidang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara			18 unit		429,998,000	18 unit	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang			4 laporan		51,910,000	4 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor			20 SPPT		30,000,000	20 SPPT	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.19.34	Penyediaan Jasa	Pengelolaan BMD			13 orang		660,288,000	13 orang	0	BPKAD	Dana		Rencana

		Pengelolaan Barang Milik Daerah									Kota Magelang	Alokasi Umum		
6	4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot			1 laporan		87,200,000	1 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD			4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)		100,399,000	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga			3 kegiatan penelitian		45,332,000	4 kegiatan penelitian	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah			8 jenis laporan		257,903,000	13 jenis laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD			185 pejabat pengelolaan barang		88,960,000	185 pejabat pengelola barang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah			10 dokumen		128,105,000	10 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.19.16	Penyelamatan aset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah			12 laporan bulanan		260,719,000	12 bulan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun			2 lapangan		68,954,000	2 lapangan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak			4 paket		63,162,000	4 paket	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir			12 kegiatan		89,303,000	4 kegiatan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun			7 rumah dinas/mess		387,532,000	6 rumah dinas/mess	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah			4 kegiatan		93,524,000	5 kegiatan	0	BPKAD Kota	Dana Alokasi		Rencana

											Magelang	Umum		
18	4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan			4 kegiatan		33,205,000	4 paket	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.19.15	Penjualan asset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual			3 paket		87,989,000	3 paket	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah			12 bidang		294,401,000	12 bidang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
21	4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 18 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 5 bus			18 unit		35,000,000	18 unit	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD			3 kegiatan		53,998,000	2 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
23	4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD			11 kegiatan		105,726,000	4 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
24	4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun			3 gedung kantor		322,656,000	4 gedung kantor	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
25	4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur			2 bidang		16,570,000	3 bidang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
26	4.4.19.35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah Pemkot			3 Kecamatan		57,291,000	4 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
27	4.4.19.44	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/mess Barang Pengelola					9,964,000	4 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL				19,789,032,683	13,653,358,249	16,365,659,000	14,961,275,945				

Magelang,
Mengetahui
Kepala BPKAD
Kota Magelang



LARSITA, SE, MSc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202199003108

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun ke depan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dimana keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi, dan komitmen yang kuat dari seluruh personil.

Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Kota Magelang Tahun 2020, Renja BPKAD Kota Magelang memiliki kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

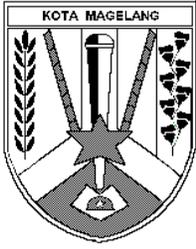
1. Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 berisi perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya;
2. Seluruh jajaran pegawai pada BPKAD Kota Magelang berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2020, Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020, maka dilakukan pemantauan dan analisa terhadap penjabaran dan sinergisitasnya ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada Bidang-bidang, serta kelanjutannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya.

Magelang, 13 Juli 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN dan ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



LARSITA, SE, MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax : (0293)
364910

MAGELANG
56101

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 050 /182 / 440 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai rencana tahunan (Renja OPD) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan (Renstra OPD);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang;
19. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.23/162/112 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020;
20. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA-OPD) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KESATU : Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2020.

KEDUA : Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.

KETIGA : Sistematika Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA
MAGELANG TAHUN 2018

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA
MAGELANG

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV : PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Juli 2019



KEPALA BADAN PENGELOLA

WALIKOTA MAGELANG KEUANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NCMOR 096.23/162/142 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
 - bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah diperlukan pengesahan oleh Walikota Magelang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Magelang tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
11. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020 untuk Perangkat Daerah se-Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Juni 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 050-23/102/02 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA
 MAGELANG
 TAHUN 2020

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.379.294.000
2	Dinas Kesehatan	77.672.228.000
3	BLUD RSUD Tidar	185.000.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.784.428.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.195.493.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.991.100.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.253.602.000
8	Dinas Sosial	2.157.714.000
9	Dinas Tenaga Kerja	2.899.118.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	47.430.147.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.301.556.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.129.205.000
13	Dinas Perhubungan	14.055.529.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.102.281.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.134.183.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.989.075.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.104.779.000
18	Dinas Pertanian dan Pangan	5.690.374.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.341.206.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
20	Sekretariat Daerah	25.553.291.000
21	Sekretariat DPRD	20.173.297.000
22	Kecamatan Magelang Selatan	7.104.680.000
23	Kecamatan Magelang Tengah	7.204.751.000
24	Kecamatan Magelang Utara	7.247.872.000
25	Inspektorat	2.726.908.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.154.340.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.365.659.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.213.573.000
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.258.366.000
	TOTAL	630.511.049.000

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO